

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK
ANGKAT WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN
TIONGHOA SEHUBUNGAN DENGAN SURAT
KETERANGAN WARIS YANG DI BUAT NOTARIS**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata -2
Program Studi Magister Kenotariatan



Diajukan Oleh :
PUTRI ANITA , SH
BP : 1420123062

Komisi Pembimbing

- 1. Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH**
- 2. Neneng Oktarina, SH., MH**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA SEHUBUNGAN DENGAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DI BUAT NOTARIS

(Putri Anita, SH, 1420123062, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 102 halaman, tahun 2016).

ABSTRAK

Bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, baik penduduk asli melalui hukum adatnya, penduduk keturunan Tionghoa melalui *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, dan orang-orang yang beragama Islam dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam. Sejak itulah *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli. Seiring berjalannya waktu beberapa pasal dalam *staablad* yang berkaitan tentang pengangkatan anak sudah tidak berlaku lagi karena dianggap sebagai pelaksanaan politik hukum kolonial dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga saat ini Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Adapun yang dibahas yaitu: prosedur pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa agar sah secara hukum dan bagaimana kedudukannya dalam hal waris, kedudukan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris bagi anak angkat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, perlindungan hukum hak waris anak angkat warga negara Indonesia keturunan tionghoa sehubungan dengan adanya pembuatan surat keterangan waris oleh notaris. Sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimulai dari Pasal 19 sampai Pasal 25 PP tersebut. Pembuatan keterangan hak waris oleh seorang Notaris bagi orang-orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada dasarnya dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka anak angkat merupakan ahli waris yang perlu dilindungi haknya, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Waris Anak Angkat, Surat Keterangan Waris*

LAW PROTECTION ON THE INHERITANCE OF ADOPTED INDONESIAN CITIZEN OF CHINESE DESCENT IN RELATION TO THE INHERITING CERTIFICATE MADE BY NOTARY

(Putri Anita, SH, 1420123062, Notaries Magister Program of Law Faculty of Andalas University, 102 pages, year of 2016).

ABSTRACT

The practice of adopting child has been widely known by the Indonesian society, whether they are native inhabitants through their custom laws, Chinese descent through *Staatsblad* number 129 in the year of 1917, and Moslem people by using the convention of Islamic law. Since then the *Staatsblad* 1917 number 129 has become written convention of law which guides the rules of adopting child for Chinese descent, and this rules is inapplicable for the native inhabitants of Indonesia. The basic law of notary to make certificate of adopting child is regulated in chapter II *Staatsblad* 1917 number 129 about adopting child that is in convention 10 clauses (1), which tells that adopting child can only be done by the existence of notary certificate. The details is about: the procedures of adopting child for Indonesian citizen Chinese descent to be valid by law and how is the position in term of inheriting based on the civil law and based on *Staasblaad* year of 1917 number 129, the law position of inheriting certificate which made by the notary for adopted child of Indonesian citizen Chinese descent, law protection of inheriting adopted child of Indonesian citizen Chinese descent in relation to the availability of inheriting certificate made by notary. This research is descriptive with empirical juridical problem approach, using two sources of data that are primer and secondary data. Techniques of data collecting is using the study of documents and doing semi-structured interview. Obtained data was processed by using editing technique, and was analyzed using qualitative method. The procedures of adopting child is regulated by convention 8 until 10 *Staatsblad* 1917 number 129, clause 10 this adopting child should be done with notary certificate, clause 14 an adopting child is resulted in the broken of law relationship between adopted child with their parents. There is no basic written law apply in Indonesia for the making of inheriting certificate by a notary for the people who conforms civil law right. Adopting child is an action of law which gives position to other people child the same position as legitimate child. In addition, adopted child is the heir that needs protection on his or her right, which is regulated by the law number 23 Year of 2002 about children protection.

Key words: Law protection, inheritance of adopted child, inheriting certificate.